

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
2013**

**IMPLEMENTATION OF READING CULTURE DEVELOPMENT PROGRAM AND LIBRARY
SUPERVISION IN DISTRICT OF BANYUWANGI, BANYUWANGI REGENCY IN 2013**

Anggun Pramita Sari, Supranoto, Suji,
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37 , Jember 68121 E-mail: anggunpramita.sari@yahoo.com

Abstract

This research aimed to describe the implementation of Reading Culture development program and Library Supervision in District of Banyuwangi, Banyuwangi Regency in 2013. The research used a qualitative approach with descriptive research type, that is, a research aimed to explore what is available in the field. Informants in the research were divided into two types, namely key informants and supporting informants. Key informants were determined by purposive sampling, while supporting informants were determined by snowball sampling. Data were collected by interview, documentation, and literature. The research used interactive data analysis proposed by Miles and Huberman. The results showed that the implementation of Reading Culture development program and Library Supervision in District of Banyuwangi, Banyuwangi Regency in 2013 had not been going well or had not been properly implemented because the implementation was not known by many people and only went for approximately three months. The guideline for the implementation of the program was Letter of Assignment of Head of Banyuwangi District Number: 010/616/429.501/2013. To support this program, the government of District of Banyuwangi provided 2 cars operating alternately on Monday through Friday at the appointed places, and each place gained the schedule of three-time visit in a week from 12:00 p.m. to 3:00 p.m. This program should have been implemented in all villages in District of Banyuwangi; however, because of the limited time and personnel and minimum accommodation, then the mobile library program was conducted only in the administrative villages located in the downtown of Banyuwangi, that is, Administrative Villages of Kebalenan, Sobo, Tukang Kayu, Karangrejo, and Kertosari.

Kata Kunci: *implementasi, program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan*

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Ripley dan Franklin yang dikutip Winarno (2007:145) berpendapat bahwa, “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output)”. Istilah implementasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Kecamatan Banyuwangi merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Layaknya kecamatan atau instansi lain, Kecamatan Banyuwangi juga mempunyai Renja dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Renja SKPD Kecamatan Banyuwangi disusun berdasarkan atas analisis kondisi obyektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi SKPD Kecamatan Banyuwangi saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang.

Terdapat satu perbedaan antara Renja dan LAKIP Kecamatan Banyuwangi tahun 2013, yakni

jumlah program kerja yang terdapat di Renja Kecamatan tujuh, sedangkan program kerja yang terdapat di LAKIP terdapat delapan program. Hal ini mengidentifikasi bahwa antara formulasi dan implementasi program tidak sama. Yang membedakan program kerja yang ada di Rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi dan LAKIP Kecamatan Banyuwangi tahun 2013 adalah adanya program peningkatan minat baca yang dilakukan melalui kegiatan perpustakaan keliling. Dari delapan program Kerja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013, dalam penelitian ini akan memfokuskan pada program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Alasan peneliti mengambil program ini karena antara Renja dengan LAKIP Kecamatan Banyuwangi tahun 2013 tidak sama, programnya juga mendadak dilakukan dan banyak pihak yang tidak mengetahui adanya program ini, sehingga hal ini mengidentifikasi bahwa antara formulasi dengan implementasi tidak sama. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba meneliti mengapa program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dalam LAKIP Kecamatan Banyuwangi 2013 ada namun di Rencana Kerjanya tidak ada.

Program dadakan Goenawan selaku Kepala Bidang sosial dan budaya di Kecamatan Banyuwangi ini disambut baik oleh Camat Banyuwangi karena beliau juga berpendapat sama dengan Goenawan bahwa minat baca di kalangan anak-anak dan remaja dirasa sangat kurang. Melalui program ini, layanan perpustakaan akan

didekatkan pada masyarakat, misalnya di alun-alun, taman kota Sri Tanjung, pantai boom, atau di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi. Pedoman implementasi program ini adalah Surat Perintah Tugas Camat Banyuwangi Nomor: 010/616/429.501/2013 yang berisi perintah untuk melaksanakan program perpustakaan keliling pada Bagus Sudartono, Imron Rosidi, Tjatur Fajar, dan Indah Pratiwi. Namun surat ini hanya berisi surat tugas saja tanpa adanya pedoman pelaksanaan dan tupoksi yang jelas. Untuk mendukung program ini, pemerintah Kecamatan Banyuwangi menyediakan 2 mobil yang beroperasi secara bergantian pada hari Senin sampai Jumat di tempat yang telah ditentukan dan setiap tempat mendapatkan jadwal tiga kali dalam seminggu mulai dari jam 12.00 sampai dengan 15.00 karena pada jam-jam tersebut waktunya anak sekolah atau pekerja beristirahat dan pulang. Seharusnya program ini dilaksanakan di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi, namun karena waktu yang terbatas serta personel dan akomodasi yang minim, maka program perpustakaan keliling hanya dilakukan di kelurahan yang berada di Banyuwangi kota, yakni kelurahan Kebalenan, Sobo, Tukang Kayu, dan Karangrejo.

Dalam suatu proses kebijakan publik tahapan yang paling penting adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan atau dilaksanakan agar mempunyai dampak yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan.

Sebenarnya program peningkatan minat baca melalui perpustakaan keliling tidak direncanakan dalam program Rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013, namun karena adanya situasi dan kondisi tertentu yakni masih tersisanya banyak dana di akhir tahun dan karena *implementor* yakni Goenawan selaku Kepala bidang sosial dan budaya Kecamatan Banyuwangi melihat masih rendahnya minat baca di masyarakat terutama di kalangan anak-anak dan remaja yang ada di Kecamatan Banyuwangi, maka keluarlah ide program perpustakaan keliling ini. Dalam implementasi kebijakan publik hal ini dinamakan diskresi.

Lukman (dalam Ridwan, 2006:177) menjelaskan bahwa “diskresi adalah sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Terkait dengan pelaksana memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan dari program. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, situasi, dan kondisi yang dialami pelaksana program dapat merubah teknis penerapannya”. Jones (1991:295) mengungkapkan mengenai masalah yang dihadapi *implementor* kebijakan atau program, adalah banyaknya konflik dan dilema yang tidak dapat dipecahkan juga dapat menyumbang pada kualitas dan dinamika dan interaksi dari penerapan, dalam kenyataannya tujuan-tujuan program mungkin akan mengungkapkan atau secara substansial mengubah proses penerapannya.

Bentuk diskresi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mengikuti bentuk *diskresi in social planning*. Bahwa dengan kompleksnya permasalahan masyarakat pada saat program dilaksanakan, memungkinkan pelaksana program yakni pegawai kantor Kecamatan Banyuwangi khususnya Goenawan selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Kecamatan Banyuwangi berinisiatif membuat program perpustakaan keliling ketika menjelang akhir tahun karena anggaran Kecamatan Banyuwangi pada tahun 2013 masih banyak. Alasan Goenawan mencanangkan program ini karena melihat rendahnya minat baca di masyarakat terutama anak-anak dan remaja karena mereka lebih gemar melihat televisi dan internet daripada membaca buku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan jenis deskriptif, yakni sebuah penelitian yang ingin mengungkapkan apa adanya di lapangan. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*, sedangkan informan pendukung ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, 1984 (disitir dari Sugiyono, 2008:246) mengemukakan

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Untuk uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dikutip oleh Moleong, 2007:330).

Hasil Penelitian

Kemudian untuk memperoleh informasi dan data yang akurat tentang Implementasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013, maka peneliti melakukan wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Sebenarnya program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan tidak terdapat dalam Rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013, namun dalam LAKIP terdapat program ini. Dalam implementasi kebijakan publik, hal ini disebut sebagai diskresi program. Lukman (dalam Ridwan, 2006:177) memberikan pengertian diskresi merupakan sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Terkait dengan pelaksana memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan dari program. Dalam rangka

mewujudkan tujuan tersebut, situasi, dan kondisi yang dialami pelaksana program dapat merubah teknis penerapannya. Berkaitan dengan permasalahan yang mungkin muncul dalam sebuah implementasi program, maka diberikanlah kewenangan kepada pelaksana program (*implementator*) untuk melaksanakan program dengan berorientasi kepada tujuan. Soenarko (2003:193) menjelaskan bahwa isi dari suatu kebijaksanaan pemerintah lebih bersifat menentukan pelaksanaannya. Isi kebijakan yang luas akan meliputi keadaan dan kondisi yang berbeda-beda, baik geografis, sosial, ekonomi dan budaya. Dengan kondisi tersebut dibutuhkanlah kewenangan untuk mengatur pelaksanaan dengan disesuaikan kepada tujuan kebijakan.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa diskresi diberikan kepada pihak pelaksana dengan lebih menekankan kepada usahanya mencapai tujuan dari suatu kebijakan atau program. Keleluasaan tersebut adalah menyesuaikan pelaksanaan suatu program dengan lingkungan masyarakatnya. Terkait penggunaan keleluasaan, dijelaskan oleh Ridwan (2006:235) bahwa kewenangan yang luas yang dimiliki pemerintah atas dasar *freies ermessen* kemudian melahirkan kebijaksanaan dengan menggunakan perjanjian. Pemerintah dapat menjadikan kewenangannya luas atau kebijaksanaan yang dimilikinya sebagai objek dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya Mass dan Radway (dalam Soenarko, 2000:194) menjelaskan bahwa ada tiga macam kewenangan atau keleluasaan yang diberikan kepada pelaksana-

pelaksana kebijakan, baik itu perseorangan atau lembaga pemerintah. Ketiga kewenangan tersebut diantaranya:

a. Tehnical Discretion

Kelonggaran teknis ini memberikan kesempatan kepada pelaksana kebijakan untuk merubah cara atau alat-alat yang seharusnya dengan cara atau alat-alat yang sesuai dengan keadaanya, sehingga memungkinkan dan memperlancar tercapainya tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijaksanaannya

b. Discretion in sosial planning

Kewenangan ini memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk mengurangi ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam program kebijaksanaan serta membuat suatu rencana sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan kebijaksanaan itu akan mendapat sambutan masyarakat sebagaimana mestinya.

c. Discretion in reconciliation of interests

Kelonggaran atau kekuasaan ini menghendaki agar pelaksana dalam menghadapi sengketa atau pertentangan kepentingan yang timbul di tengah masyarakat, dapat mengadakan penyelesaian, antara lain dengan menyelenggarakan musyawarah antara kelompok keutan masyarakat (*pressure group*) sehingga terbentuk perpaduan kepentingan, yang diperlukan untuk kelancaran pelaksana kebijakan.

Bentuk diskresi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mengikuti bentuk *diskresi in sosial*

planning. Bahwa dengan kompleksnya permasalahan masyarakat pada saat program diimplementasikan, memungkinkan pelaksana program yakni pegawai kantor Kecamatan Banyuwangi khususnya Goenawan selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Kecamatan Banyuwangi berinisiatif membuat program perpustakaan keliling ketika menjelang akhir tahun karena anggaran Kecamatan Banyuwangi pada tahun 2013 masih banyak yang belum terserap. Alasan Goenawan mencanangkan program ini karena melihat rendahnya minat baca di masyarakat terutama anak-anak dan remaja karena mereka lebih gemar melihat televisi dan internet daripada membaca buku.

Hasil pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi, selanjutnya akan dianalisis menggunakan variabel atau faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn. Adapun variabel-variabel atau faktor-faktor yang terdapat dalam model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn terdiri dari:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumber-Sumber Kebijakan.
3. Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan.
4. Karakteristik Badan Pelaksana.
5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.
6. Kecenderungan Pelaksana (*implementors*).

Keenam faktor di atas yang akan dijadikan sebagai alat analisis dalam kerangka seluruh proses

yang ada dalam program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tahun 2013. Berdasarkan variabel-variabel atau faktor-faktor di atas dan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian dilakukan analisa sebagai berikut.

Pembahasan

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Wahab (2008:78) menyatakan bahwa, “perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan”. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008:80) digambarkan sebagai berikut.

Berikut ini hasil analisis data dengan metode analisis data interaktif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hal ini berkaitan dengan ukuran dasar dari implementasi program perpustakaan keliling. Ukuran dasar yang digunakan atau sebagai pedoman dalam program ini adalah Surat Perintah Tugas Camat Banyuwangi Nomor: 010/616/429.501/2013 yang berisi perintah untuk melaksanakan program perpustakaan keliling pada Bagus Sudartono, Imron Rosidi, Tjatur Fajar, dan

Indah Pratiwi. Namun surat ini hanya berisi surat tugas saja tanpa adanya pedoman pelaksanaan dan tupoksi yang jelas. Dan tujuan diimplementasikannyaprogram perpustakaan keliling adalah untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat Kecamatan Banyuwangi terutama pada anak-anak dan remaja karena saat itu mereka cenderung lebih senang melihat televisi dan internet daripada membaca buku.

Berdasarkan hasil dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara dapat disimpulkan bahwa semua petugas pelaksana kebijakan Rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 memahami ukuran dan tujuan kebijakan tersebut dan penerima kebijakan ini juga tidak semuanya memahami apa yang telah menjadi ukuran dan tujuan dari adanya program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Tujuan dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Banyuwangi juga tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Banyuwangi semuanya karena program ini hanya berjalan sebentar, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya program ini. Bagi pihak pemerintah, program ini tidak terdapat dalam Renja Kecamatan Banyuwangi namun dalam LAKIP Kecamatan Banyuwangi program ini ada, sehingga tidak ada sosialisasi atau koordinasi dengan instansi lain atau masyarakat karena program ini diimplementasikan secara mendadak.

2. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan yang di maksud adalah mencakup dana, personil, atau perangsang lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan Implementasi Program Kerja Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Sumber dana yang digunakan dalam Implementasi Program Kerja Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 sebesar Rp 1.846.062.000 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Pagu dan Rincian Anggaran Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	Rp1.438.722.000,00
2.	Belanja Langsung Belanja Pegawai	Rp 37.609.000
	Belanja Barang Jasa	Rp 326.128.000
	Belanja Modal	Rp 43.603.000

Sumber: LAKIP Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013

Realisasi anggaran Kecamatan Banyuwangi per- 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 1.733.848.050 atau 93,92% dari pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013

No.	Jenis Belanja	Jumlah	Prosentase
1.	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	Rp1.360.130.864	94,54
2.	Belanja Langsung Belanja Pegawai	Rp 34.680.500	92,21
	Belanja Barang	Rp	90,83

Jasa	296.236.686	
Belanja Modal	Rp	98,16
	42.800.000	

Sumber: LAKIP Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat jelas bahwa personel yang diterjunkan untuk mengimplementasikan program perpustakaan keliling ini sangatlah minim karena programnya mendadak dilakukan, jadi jumlah personel yang diterjunkan adalah pegawai Kecamatan Banyuwangi yang tidak mempunyai tugas yang berat saat itu. Sebenarnya hal ini tidak cukup efektif jumlah personelnnya jika banyak pengunjung perpustakaan.

3. Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi yang terjadi dalam kebijakan implementasi program pengembangan minat baca melalui perpustakaan keliling adalah koordinasi pembagian tugas antara pegawai pelaksana kegiatan, misalnya dalam penugasan yang dilakukan koordinator kegiatan kepada tenaga lapangan. Selain hal tersebut ada juga komunikasi melalui bentuk kerjasama antar pihak dan juga lembaga yang terkait dengan program ini. Komunikasi tersebut misalnya dalam bentuk kegiatan sosialisasi tentang kapan jadwal perpustakaan keliling ada di tempat yang telah ditentukan, dalam hal ini ada kerjasama antara pihak Kecamatan Banyuwangi (utamanya petugas lapangan) dengan pihak Kelurahan dan Lurah-Lurah yang ada di Kelurahan Kecamatan Banyuwangi. Dari hasil wawancara mendalam

yang dilakukan peneliti, ditemukan fakta bahwa pihak Kecamatan Banyuwangi tidak pernah mengkoordinasikan maupun menginformasikan program perpustakaan keliling kepada Lurah maupun pihak Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi, sehingga banyak pihak yang tidak tahu adanya program ini. Ada pihak yang tahu, namun mereka tahu saat program ini sedang diimplementasikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, tidak ada komunikasi formal maupun informal antara pihak Kecamatan Banyuwangi dengan Lurah maupun pihak Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi tentang program perpustakaan keliling sehingga banyak pihak yang tidak mengetahui kapan jadwal perpustakaan ini dan apa tujuan yang ingin dicapainya. Malah pihak Kelurahan maupun Lurah ini tahu program ini ketika sudah diimplementasikan, namun tidak semuanya mengetahui.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan atau instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Kecamatan Banyuwangi adalah bagaimana dan unsur apa saja yang mempengaruhi badan tersebut dalam melaksanakan implementasi program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan melalui perpustakaan keliling. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik badan pelaksana dalam hal ini adalah pihak Kecamatan Banyuwangi mengimplementasikan program perpustakaan

keliling ini di akhir tahun dan tanpa konsep yang jelas, sehingga tidak banyak pihak yang terkait dalam program. Oleh karena itu, program perpustakaan keliling ini tidak banyak yang tahu baik dari unsure pemerintah maupun masyarakat karena tidak ada sosialisasi ataupun info tentang program ini sebelumnya.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan hal yang menjadi pusat perhatian. Keadaan atau kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat menentukan bagi pencapaian badan-badan pelaksana. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan atau program akan berjalan baik apabila keadaan atau kondisi ekonomi, sosial, dan politik di daerah tersebut dalam penelitian ini adalah Kabupaten Banyuwangi juga dapat mendukung adanya program perpustakaan keliling ini.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari kebijakan program perpustakaan keliling ini tidak begitu mendukung, pada kondisi ekonomi ini tidak ada kesiapan dana karena program ini awalnya tidak direncanakan, sehingga dana yang digunakan merupakan dana sisa anggaran yang ada di Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013. Untuk kondisi sosial juga kurang mumpuni karena banyak masyarakat yang tidak tahu adanya program ini, sehingga mereka tidak sempat berkunjung ke perpustakaan keliling ini. Bagi masyarakat yang

tahu akan program ini, mereka senang dengan program ini namun karena hanya berjalan beberapa bulan saja mereka menjadi kecewa dengan program ini. Kondisi politiknya dalam hal ini tidak ada karena program ini mendadak dilakukan, jadi tidak banyak pihak yang mengetahui adanya program ini sehingga tidak ada dukungan dari pemerintah atau pihak lain terkait program ini karena mereka tidak tahu akan adanya program ini.

6. Kecenderungan Pelaksana

Kecenderungan pelaksana atau sikap para pelaksana kebijakan (*implementors*) sangat penting diperhatikan, karena dengan pemahaman dan adanya dukungan terhadap kebijakan ini maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sebaliknya. Dalam hal ini jika pelaksana sudah tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut, maka pelaksana tersebut melaksanakan kegiatan dengan setengah hati atau tidak maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pelaksana program ini sangat sependapat dengan adanya kegiatan ini dan sangat mendukungnya. Untuk pemahaman tentang kebijakan ini, peneliti melihat dari awal wawancara mengenai ukuran dan landasan kegiatan dan hal itu sudah dipahami oleh semua pelaksana kegiatan kebijakan ini. Jadi kebijakan ini berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dan pemahaman kebijakan dari para pelaksananya.

. Dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka keenam faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa enam faktor tersebut tidak saling mendukung terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang nantinya arahnya pada prestasi kerja yang diharapkan yakni tercapainya tujuan-tujuan kebijakan seperti yang digambarkan oleh model implementasi Van Meter dan Van Horn. Kebijakan ini adalah kebijakan yang sedang berjalan, belum semua tujuan-tujuan tercapai tetapi saat ini program ini telah selesai dan dianggarkan lagi pada tahun depannya.

Dalam pelaksanaannya para pegawai pelaksana program perpustakaan keliling ini melakukan tanpa prosedur yang jelas karena program ini awalnya memang tidak direncanakan dalam Renja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013, sehingga program ini terkesan asal-asalan. Bahkan program ini hanya berjalan kurang lebih tiga bulan dan banyak masyarakat maupun pemerintah dari dinas atau instansi lain yang tidak tahu program ini, padahal sebenarnya banyak masyarakat terutama generasi muda yang sangat membutuhkan program ini.

Implementasi program perpustakaan keliling ini tidak mengalami kendala bahkan masyarakat sangat senang dengan adanya program ini, namun karena programnya mendadak dan sebelumnya tidak ada sosialisasi maka instansi lain tidak ada yang mendukung adanya program ini, namun sebenarnya ketika mereka mengetahui ada program ini mereka sangat mendukung. Mungkin untuk lebih mengoptimalkan implementasi

program ini, maka pemerintah Kecamatan Banyuwangi sangat perlu memasukkan program ini dalam rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2014.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 belum berjalan dengan baik atau belum terimplementasikan dengan baik karena pelaksanaannya mendadak, sehingga tidak banyak diketahui orang dan hanya berjalan kurang lebih tiga bulan.
2. Pedoman implementasi program ini adalah Surat Perintah Tugas Camat Banyuwangi Nomor: 010/616/429.501/2013 yang berisi perintah untuk melaksanakan program perpustakaan keliling pada Bagus Sudartono, Imron Rosidi, Tjatur Fajar, dan Indah Pratiwi. Namun surat ini hanya berisi surat tugas saja tanpa adanya pedoman pelaksanaan dan tupoksi yang jelas. Untuk mendukung program ini, pemerintah Kecamatan Banyuwangi menyediakan 2 mobil yang beroperasi secara bergantian pada hari Senin

sampai Jumat di tempat yang telah ditentukan dan setiap tempat mendapatkan jadwal tiga kali dalam seminggu mulai dari jam 12.00 sampai dengan 15.00. Seharusnya program ini dilaksanakan di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi, namun karena waktu yang terbatas serta personel dan akomodasi yang minim, maka program perpustakaan keliling hanya dilakukan di kelurahan yang berada di Banyuwangi kota, yakni Kelurahan Kebalenan, Sobo, Tukang Kayu, Karangrejo, dan Kertosari.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan implemenasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan berikut ini.

1. Untuk implementasi program perpustakaan keliling selanjutnya diharapkan menambah mobil dan personel agar dapat lebih memberikan pelayanan prima pada masyarakat karena jumlah kendaraan dan personel sangat minim untuk mencapai tujuan program ini.

2. Sebaiknya program perpustakaan keliling ini diimplementasikan di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi, jangan hanya di kelurahan yang ada di dalam kota agar tujuan program perpustakaan keliling sebagai sarana meningkatkan minat baca di kalangan anak-anak dan remaja di Kecamatan Banyuwangi dapat tercapai.

3. Koordinasi dan sosialisasi dengan unsur pemerintah lainnya serta *stakeholder* lain sangat penting dilakukan sebelum suatu program diimplementasikan agar program ini nantinya diketahui dan diharapkan mendapatkan dukungan dari para *stakeholder*, sehingga tujuan program lebih mudah dicapai.

Daftar Pustaka

- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Soenarko S. D. 2000. *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Universitas Jember. 2013. *Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah*. Jember: UPT Penerbit Universitas Jember
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

